

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR :001.a/ HK.01.01 / K.ST-09 / 01 / 2023

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POSO NOMOR : 009/HK.01.01/K.ST-09/10/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perlu Dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Poso.

b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Poso terdiri dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso, Kepolisian Resort Poso, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Poso untuk penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum.

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181).

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421)

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)

- Memperhatikan :
- a. Surat intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00/K1/07/2022 Tentang Pembentukan Sentra Pegakan Hukum Terpadu.
 - b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Pegakan Hukum Terpadu.
 - c. Surat Tugas Nomor : 001.a/PP.00.002/K.ST-09/8/2022, Tentang nama - nama Pelaksanan tugas pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 02 Januari 2023.
 - d. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Poso Nomor : Sprin 554/VII/HUK.6.6/2022/Reskrim Poso Tentang nama - nama Pelaksanan tugas pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dari Unsur Kepolisian Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 29 Juli 2022.
 - e. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Poso Nomor : Print B-649/P.2.13/Cp./07/2022 Tentang nama - nama Pelaksanan tugas pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dari Unsur Kejaksaan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 28 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Poso Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan nama-nama jabatan dan kedudukan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KE DUA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) sebagaimana di maksud dictum pertama melaksanakan tanggung jawab untuk melaksanakan :
- a. Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
 - b. Menyusun Pelaporan Terhadap kinerja Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyusun laporan pertanggung-jawaban atas hasil kegiatan secara hirarki kepada Ketua Bawaslu dan instansi masing-masing.
- KE TIGA** : Dalam Pelaksanaan tugas Pembina, koordinator dan anggota bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).
- KE EMPAT** : Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SP-DIPA 115.01.2.686463/2022. Dengan rincian Honorarium sebagai berikut :



KE LIMA : Segala biaya operasional yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SP-DIPA 115.01.2.686463/2022.

KE ENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Poso

Pada tanggal : 3 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
K E T U A,**

TTD

ABDUL MALIK SALEH, S.Sos.,M.AP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kepala Kepolisian Resort Poso
3. Kepala Kejaksaan Negeri Poso
4. Arsip

Lampiran SK : 001.a/ HK.01.01 / K.ST-09 / 01 / 2023
Tanggal : 3 Januari 2023

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN POSO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

N	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENASIHAT			
1.	Abdul Malik Saleh, Sos.,M.AP	Ketua Bawaslu Kabupaten Poso	Penasihat
2.	Rentrix.R.Yusuf, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Poso	Penasihat
3.	Lapatawe B. Hamka, S.H, M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Poso	Penasihat
PEMBINA			
1.	Helmi Mongi, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Poso	Pembina
2.	Anang Mustaqim, S.S.T.K.S.I.K.,M.H	KASAT RESKRIM POLRES POSO	Pembina
3.	Muhammad Amin, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Poso	Pembina
KOORDINATOR			
1.	Christian A. Oruwo, S.H.,M.H	Koordinator Divisi Penindakan	Ketua Koordinator
2.	Ringgon Situmorang, S.H	KANIT TIPIDTER	Koordinator
3.	Enjang Slamet, S.H	Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara	Koordinator
TIM PELAKSANAAN			
1.	William O. Malala, S.IP	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso	Anggota
2.	Prisca M.G Metusala, S.IP	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso	Anggota
3.	I Made Sudarsana, S.H	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso	Anggota
4.	Yustenli Palalu, S.H	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso	Anggota
5.	Suadarma P.S.Engku, S.Kom	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso	Anggota
6.	Sandynov Pongdatu,S.H	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso	Anggota
7.	Ben Azarya Tawonagi, S.P	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso	Anggota
8.	Franky H.C Mampuk	BA UNIT TIPIDKOR	Anggota
9.	Andi Nanang Zulfikar	BA UNIT TIPIDKOR	Anggota
10.	Masdar	BA UNIT RESUM	Anggota
11.	Aldrian Kiding	BA UNIT RESUM	Anggota
12.	Padlyansar Husein	BA UNIT PPA	Anggota
13.	Nauval Arbi Wibowo, S.H	Subseksi Ekonomi Keuangan Dan Pengamanan Pembangunan Strategis	Anggota
14.	Muhammad Reza Kurniawan, S.H,M.H	Kepala Seksi Intelejen	Anggota
15.	Abdulah M. Ihsan, S.H	Jaksa Funsional	Anggota
16.	Salma Adila, S.H	Yuana Wira, TU	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
K E T U A,

TTD

ABDUL MALIK SALEH, S.Sos.,M.AP

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sekretariat



William Otniel Malala, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19880828 200701 1 001